

DUGAAN KORUPSI DI LAPAS CEBONGAN

Polisi Naikkan Status ke Penyidikan

SLEMAN (KR) - Kasus dugaan pungli oleh oknum pegawai di Lapas Cebongan, memasuki babak baru. Polresta Sleman menaikkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Aduan kami terima tahun 2023, kemudian kami lakukan penyelidikan. Kami memeriksa 18 orang saksi terdiri dari warga binaan, dokter dan beberapa pejabat Lapas. Setelah melalui gelar perkara, kasus ini telah kami naikan ke tahap penyidikan," ungkap Kapolresta Sle-

man Kombes Pol Yudianto Ardi saat jumpa pers di Mapolresta Sleman, Rabu (29/5).

Kapolresta menyebut, kenaikan status itu bukan karena ada tekanan dari pihak manapun. Akan tetapi, murni dari hasil atau proses penyelidikan yang dilakukan oleh



Kapolresta Sleman didampingi Kasat Reskrim saat menyampaikan keterangan pers, Rabu (29/5).

KR - Wahyu Priyanti.

penyidik Polresta Sleman.

Sedangkan Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian mengatakan, penyelidikan dilakukan sekitar 5 bulan. Selama proses penyelidikan itu, penyidik sudah meminta belasan saksi dalam menemukan barang bukti.

"Dalam penanganan perkara dugaan korupsi itu, terduga pelaku memiliki kewenangan dan jabatan. Sehingga, penyidik berhati-hati dalam prosesnya, agar tidak ada barang

bukti yang dihilangkan. Meskipun sudah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Hanya saja dalam waktu dekat, akan dilakukan upaya hukum terkait pemanggilan kembali terduga pelaku dengan berita acara pemeriksaan. "Belum ada penetapan tersangka, kemarin baru kita interogasi. Modus yang dilakukan banyak, nanti akan kita sampaikan saat rilis," pungkasnya. (Ayu)-f

PETA POLITIK DI SLEMAN SEMAKIN BERWARNA

Sukanto Daftar Cawabup di PDI Perjuangan

SLEMAN (KR) - Peta politik di Kabupaten Sleman sekarang ini semakin mengerucut dengan munculnya nama-nama calon yang bakal meramaikan Pilkada. Kali ini Anggota DPR RI dari PKB H Sukanto SH juga ikut mendaftar di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman sehingga peta politik bertambah berwarna.

Sukanto mengatakan, dalam mendaftar ini tidak menentukan pilihan sebagai calon bupati maupun wakil bupati. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP PDI Perjuangan untuk direkomendasi sebagai calon bupati maupun wabup. "Saya sengaja tidak memilih calon bupati atau wakil bupati. Terserah partai mau merekomendasi saya Sleman 1 atau 2," katanya, Rabu (29/5).

Menurut Sukanto, dirinya tidak hanya mendaftar di PDI Perjuangan saja. Namun dirinya juga telah



H Sukanto SH saat menyerahkan berkas pendaftaran di DPC PDI Perjuangan Sleman.

KR-Saifulah Nur Ichwan

mendaftar di PKB, Golkar dan Gerindra. Hal itu untuk menunjukkan bahwa dirinya peduli dan menghormati partai politik lainnya yang ada di Kabupaten Sleman.

"Ini juga bagian untuk membangun komunikasi politik menghadapi Pilkada. Meskipun PDI Perjuangan dapat mengusung sendiri, tapi saya yakin masih butuh dukungan dari partai lain," kata Sukanto.

Sedangkan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman Y Gustan Ganda berterima kasih kepada Sukanto yang telah menghormati PDI Perjuangan dengan cara mendaftar sebagai calon kepala daerah. Dengan kehadiran Sukanto mendaftar, peta politik di Sleman semakin mengerucutkan nama-nama calon bupati.

"Paling tidak sekarang ini sudah mengerucut 4 na-

ma yang mencalonkan sebagai bupati yaitu Kustini Sri Purnomo, Danang Maharsa, Harda Kiswaya dan Sukanto. Dan kami menilai, PDI Perjuangan merupakan partai yang dilirik para calon untuk maju dalam Pilkada nanti," kata Ganda.

Dengan sudah terlihatnya nama-nama calon bupati, sekarang ini posisi calon wakil bupati juga semakin menarik. Dimana sebelumnya Staf Khusus (Stafus) Ketua Umum Perindo Fourista Handayanto Salasa alias Tato telah mendaftar sebagai calon bupati di PDI Perjuangan. Rencananya Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta SIP juga bakal mendaftar sebagai cawabup. "Ternyata setelah nama calon bupati mengerucut, nama calon wabup juga bermunculan di akhir-akhir pendaftaran," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sleman ini. (Sni)-f

PERINGATAN HLUN KE-28

Dinkes Kembangkan Puskesmas Santun Lansia

SLEMAN (KR) - Dalam penanganan lansia, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman telah mengembangkan Puskesmas Santun Lansia yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia agar sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Selain itu juga berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat, sesuai dengan konsep Integrasi Layanan Primer.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinkes Sleman dr Cahya Purnama pada Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-28 di Rumah Dinas Bupati Sleman, Rabu (29/5). Kegiatan ini dihadiri 200 peserta yang terdiri dari lansia Kabupaten Sleman, kader kesehatan, anggota PKK Sleman, dan organisasi profesi.

"Tak hanya menjadi upaya pemberdayaan lansia, peringatan HLUN juga menjadi wujud komitmen Pemkab Sleman dalam meningkatkan kesehatan lansia. Hal ini sejalan dengan tema peringatan HLUN di Kabupaten Sleman yakni Hipertensi dan Kesehatan Jiwa Terjaga, Lansia Terawat dan Indonesia Bermartabat," kata Cahya.

Ditambahkan, Umur Harapan Hidup (UHH) Sleman rata-rata dari penduduknya tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 75,26 tahun. Sementara untuk UHH di Provinsi DIY sebesar 74,91 tahun. Selain itu Sleman juga memiliki jumlah penduduk lansia pa-



Bupati Kustini menyerahkan kartu kepesertaan JKN kepada perwakilan lansia Sleman.

KR-Istimewa

ling tinggi di DIY yakni sebanyak 168.527 jiwa.

Capaian tersebut didukung oleh Bupati Sleman Kustini yang mengajak lansia dan keluarganya untuk mendaftarkan diri pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). OPD terkait juga diimbau untuk aktif mencari dan menemukan masyarakat Sleman yang belum bergabung dalam program JKN dan memenuhi kriteria, agar dapat didaftarkan melalui Pemkab Sleman.

"Jumlah penduduk lansia

yang tinggi merupakan bonus demografi yang potensial memberikan kemanfaatan. Meski demikian angka ini juga menjadi tantangan bagi kita agar lansia tetap dapat menjalani kehidupan yang sehat, mandiri, tangguh dan tentunya bahagia," katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bupati mengajak masyarakat untuk bersama memberikan perhatian dalam mewujudkan lansia tangguh yang sehat, mandiri, aktif dan produktif. (Has)-f

Wabup Kukuhkan 50 Kader Bela Negara

SLEMAN (KR) - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengukuhkan Kader Bela Negara Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi, Selasa (29/5). Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman ini diadakan di kantor Kalurahan Girikerto.

Pengukuhan mengangkat tema "Sadar Akan Bela Negara untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan bangsa Pasca-Pemilu 2024". Kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya menumbuhkembangkan kesadaran bela negara bagi Aparatur Sipil Negara, Pamong Kalurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Generasi Muda.

Menurut Danang, kader bela negara memiliki tugas



Wabup Danang Maharsa saat mengukuhkan kader bela negara Kalurahan Girikerto.

KR-Istimewa

yang cukup berat sekaligus mulia, yakni memberikan contoh dan mengajak seluruh masyarakat dalam melakukan kegiatan dan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. "Bela negara saat ini tidak harus dengan angkat senjata seperti dulu. Realisasi nilai-nilai bela negara dapat kita lakukan dari hal-

hal yang sederhana, dimulai dari diri sendiri dan dari lingkungan terdekat kita," ucapnya.

Danang menjelaskan, bela negara merupakan upaya mewujudkan rasa cinta tanah air dengan terus menumbuhkan wawasan kebangsaan terutama melalui edukasi kewarganegaraan. Dengan upa-

ya tersebut diharapkan masyarakat memiliki sikap dan perilaku bela negara yang dilandasi rasa kebangsaan, cinta tanah air dan semangat untuk rela berkorban. "Saya harap kader bela negara juga dapat mendukung pihak terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing," ucapnya.

Sementara Sekretaris Badan Kesbangpol Sleman Budi Santosa menyebutkan, kader yang dikukuhkan sebanyak 50 orang, terdiri dari perwakilan Pamong Kalurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat dan generasi muda se-Kalurahan Girikerto. Kegiatan ini diawali dengan Pelatihan Dasar yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 27 sampai 29 Mei 2024. (Has)-f

MEWAKILI SLEMAN LOMBA EPDESSEL TINGKAT DIY Bupati Apresiasi Inovasi Kalurahan Triharjo

SLEMAN (KR) - Tim penilai Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan (EPDesKel) Tingkat DIY Tahun 2024 melakukan klarifikasi lapangan di Kalurahan Triharjo, Rabu (29/5). Kalurahan Triharjo berhak maju di tingkat DIY karena berhasil menjadi Kalurahan Terbaik 1 EPDesKel Tingkat Kabupaten.

Bupati Sleman Kustini menyambut langsung Tim Penilai Klarifikasi Lapangan EPDesKel Tingkat DIY. Tim dipimpin dan diketuai Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Dr Sukanto SH MH.

Bupati mengapresiasi Kalurahan Triharjo yang telah mewakili Kabupaten Sleman untuk maju di EPDesKel Tingkat DIY. Apalagi Kalurahan Triharjo memiliki banyak inovasi yang mendukung dan dapat



Bupati menerima kedatangan tim penilai dari provinsi.

KR-Istimewa

mengembangkan potensi kalurahan. "Saya mengapresiasi Kalurahan Triharjo karena memiliki banyak inovasi dan potensi yang melibatkan masyarakat dengan berlandaskan guyub rukun dan gotong royong saling bekerjasama sehingga mampu maju mewakili Sleman di EPDesKel Tingkat DIY," ujarnya.

Bupati berharap dengan

kedatangan Tim Penilai ini selain melakukan penilaian dan melakukan perbandingan antara dokumen dan kondisi riil di lapangan. Selain itu juga dapat memberikan bimbingan, pembinaan dan perbaikan agar menjadi bahan evaluasi Kalurahan Triharjo dan kalurahan-kalurahan di Sleman. "Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan ob-

jektif, kami persilakan Tim Penilai Klarifikasi Lapangan Penilaian EPDesKel Tingkat DIY untuk melakukan klarifikasi lapangan dan berdialog secara langsung dengan narasumber Kalurahan Triharjo untuk mengetahui kondisi riil di lapangan," pungkasnya.

Sementara Sukanto menyampaikan tujuan pelaksanaan EPDesKel ini untuk mengevaluasi kalurahan untuk mengenali dan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayahnya. Selain itu juga mengetahui capaian Kalurahan dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya dalam kurun satu tahun, dan wadah apresiasi Pemerintah Pusat maupun Daerah berupa penghargaan atas prestasi Kalurahan dalam memajukan serta kesejahteraan masyarakatnya. (Has)-f

DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

Catatan untuk RPJD 2025-2045

SLEMAN (KR) - DPRD Kabupaten Sleman bersama eksekutif menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Meski demikian, bagi Hj Sumaryatin SSos MA selaku anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PKS menilai masih ada beberapa catatan terhadap RPJPD tersebut.

Menurut Sumaryatin, salah satu yang menjadi sorotan adalah tentang arah kebijakan kemandirian fiskal yang lebih optimistik. Seharusnya eksekutif berani menarget rasio perbandingan antara pembiayaan APBD dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 60 persen.

"Rasio perbandingan tahun 2023 sekitar 36,3 persen. Pada Tahun 2045, eksekutif hanya mematok 45 persen. Seharusnya eksekutif berani menargetkan pembiayaan APBD tahun 2045, yaitu 60 persen dari PAD," kata perempuan yang kerap dipanggil Atin, Rabu (29/5).

Atin menyarankan eksekutif untuk mengoptimalkan potensi PAD di Kabupaten Sleman. Di antaranya membuat kebijakan yang dapat menguntungkan bagi pelaku usaha kelas menengah, khususnya bidang usaha yang bisa tumbuh dan bidang-bidang usaha yang digeluti anak-anak muda kelas menengah.

"Kebijakan atau program untuk masyarakat kelas menengah ke bawah itu penting. Tapi kelas menengah ke atas juga perlu disentuh. Soalnya tumbuhnya ekonomi kelas mene-

Hj Sumaryatin SSos MA Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PKS

ngah pasti akan signifikan bagi pengurangan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga yang belum bekerja karena kelas menengah membutuhkan tenaga kerja," ujarnya.

Arah lingkungan hidup berkelanjutan perlu jadi perhatian dari Pemkab Sleman. Dimana pemerintah daerah harus mampu mengolah air, udara, tanah dan sampah. Pengelolaan sampah yang mandiri, berkelanjutan dan mendukung ekonomi sirkular. "Kami berharap 20 tahun yang akan datang itu tidak boleh ada sampah seperti sekarang. Sampah hanya ditumpuk, tapi jadi barang baru yang bisa dijual dan menghasilkan bagi masyarakat. Sehingga nanti dapat mendukung ekonomi sirkular," saran anggota Komisi C ini.

Selanjutnya, arah kebijakan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat, menguntungkan dan berkeadilan. Utamanya untuk BUMD yang baru dibentuk yakni BPR Sleman Syariah. Salah satu 'do something' oleh eksekutif dengan membagi 'kue' perputaran ekonomi dari pemerintah daerah.

"Misalnya untuk gaji dan pinjaman, ASN diberikan pilihan melalui BPR Sleman Syariah. Termasuk juga pembayaran ke pihak ketiga juga ditawarkan bisa melalui BPR Sleman Syariah. Sehingga BPR Sleman Syariah mendapat 'kue' dari perputaran ekonomi dari pemda," pungkasnya. (Sni)-f